

RAKOR POP TW 2 DINAS SOSIAL P3A

Kebumen,

Published by
detiktravel





DASAR HUKUM



- ❖ PERDA 7/2016 yg telah diubah menjadi PERDA 5/2021 ttg PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
- ❖ Perbup 116/2021 ttg Kedudukan, SOTK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ❖ Perbup 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian APBD pasal 46 mengamanatkan penyelenggaraan Rakor POP/K

TUPOKSI

(Perbup : 116 Tahun 2021)

TUGAS

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



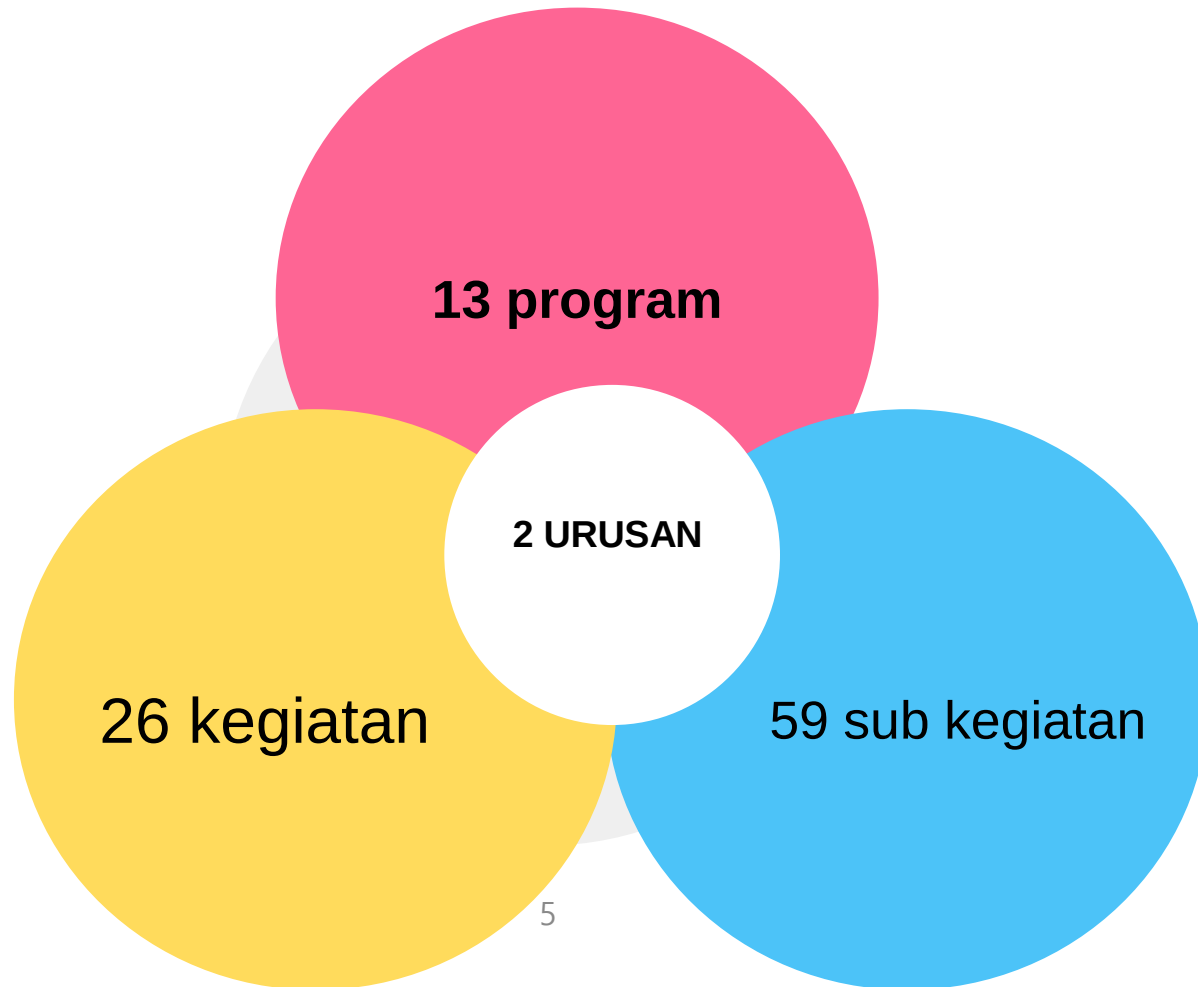
SUCCESS

Rakor POP TW 2

Evaluasi terhadap:

- 1 ➡ Anggaran yang di kelola
- 2 ➡ Aspek Keuangan (serapan anggaran) dan Fisik
- 3 ➡ Capaian SPM semester 1
- 4 ➡ Permasalahan dan solusi
- 5 ➡ Pekerjaan yang dipihak ketigakan

RENCANA KERJA



ANGGARAN YANG DIKELOLA

TOTAL OPERASI
Rp. 8.416.675.000



Belanja Pegawai
Rp. 3.850.268.000



Belanja Barang dan Jasa
Rp. 3.467.062.000



Belanja Hibah
Rp. 20.000.000



Belanja Bantuan Sosial
Rp. 1.079.345.000

TOTAL MODAL
Rp. 5.065.000



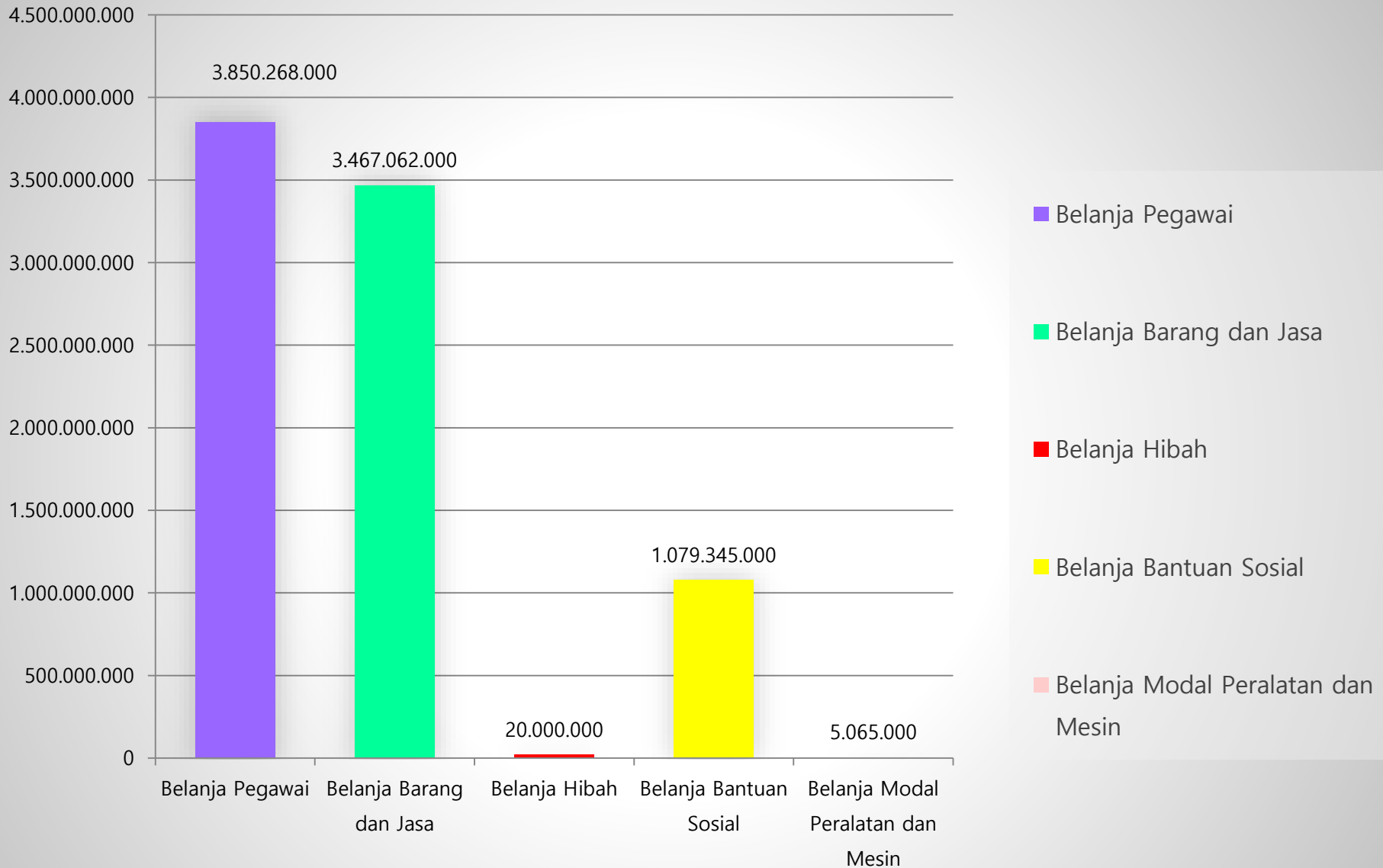
Belanja Modal
Rp. 5.065.000

TOTAL BELANJA
Rp 8.421.740.000

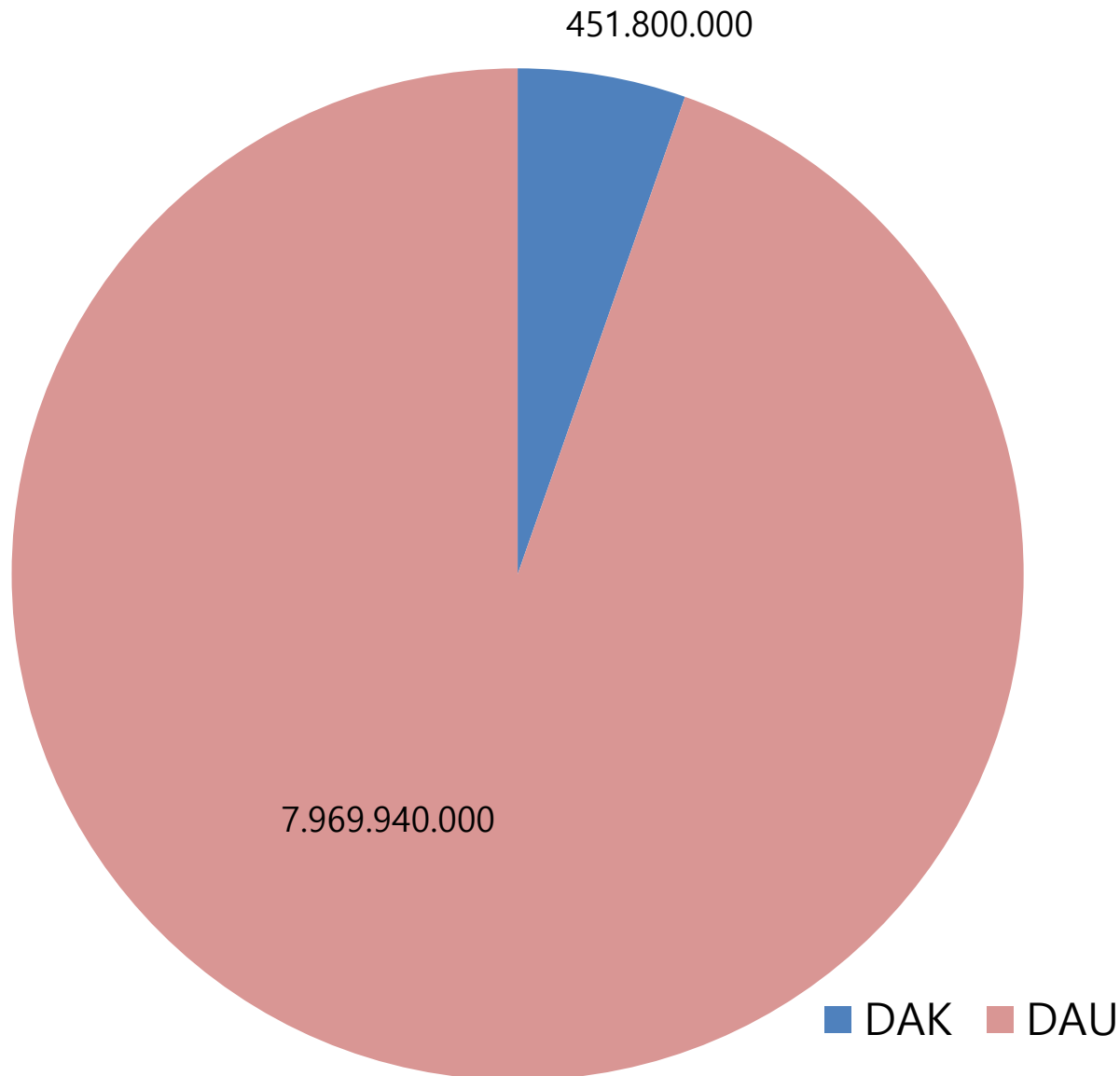
SEBARAN ANGGARAN



SUCCESS



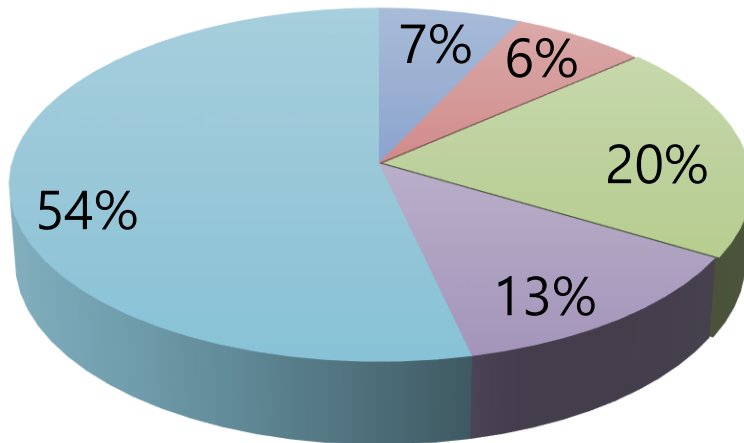
LANJUTAN ...



ALOKASI ANGGARAN PERBIDANG



- Bid. Perlindungan dan Jaminan sosial
- Bid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan sosial
- Bid. Rehabilitasi Sosial
- Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sekretariat



1

Bidang 1

Bidang perlindungan dan jaminan sosial (589.210.000)

2

Bidang 2

Bidang Penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial (553.489.000)

3

Bidang 3

Bidang Rehabilitasi Sosial (1.679.477.000)

4

Bidang 4

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (1.087.082.000)

5

Sekretariat

Sekretariat (4.512.482.000)

02

Capaian target dan realisasi keuangan dan fisik s/d bulan Juni



Pagu anggaran Rp 8.421.740.000

Uraian	Target		Realisasi		Deviasi
	Rp	%	Rp	%	%
KEU	5.366.341.800	63,72	3.387.178.002	40,22	23,50
FISIK	5.366.341.800	63,72	3.790.780.685	45,01	18,71



Indikator SPM	Target 2022	Realisasi 2022 (tw 2)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100%	65,45%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial	100%	74,80%
Rehabilitasi lanjut usia terlantar diluar panti sosial	100%	66,08%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	100%	74,59%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten /kota	100%	100%

PERMASALAHAN



Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

NO	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Proses SPJ, penggunaan BBM migran di sesuaikan dengan kebutuhan	Percepatan SPJ

PERMASALAHAN



No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Proses Koordinasi dan komunikasi dengan kemensos	kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3
2		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Anggaran dialihkan ke CSR Bank Jateng, sehingga ada pergeseran anggaran senilai 160.654.000, berupa cetak kartu KKS, dan kegiatan belum dilaksnakan	sudah dilaksanakan entry perubahan di SIPD, dan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus

PERMASALAHAN



Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

NO	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan koordinasi antara provinsi dan kemensos	akan lanjut di laksanakan di bulan Juli
2		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	SPJ belum bisa dilaksanankan dikarenakan belum ada tagihan BBM dari pihak ke 3	koordinasi dengan pihak ke 3 koordinasi dengan pihak ke 3
3		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	SPJ belum bisa dilaksanakan dikarena kan belum ada BBM dari pihak ke 3	koordinasi dengan pihak ke 3

PERMASALAHAN



No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Rehabilitas Sosial Keg: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pembayaran Tahap 1 dan 2 belum terealisasi dikarenakan kelengkapan SPJ masih kurang	Percepatan dalam melengkapi SPJ
2		Penyediaan Sandang	Penerima Manfaat 90 Orang , 6 Orang Lansia Meninggal Dunia	
3		Penyediaan Alat Bantu	Pembayaran belum bisa dilaksanakan karena kelengkapan SPJ masih kurang	Percepatan dalam melengkapi SPJ
4		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Belum bisa terealisasi 100%, dari Penerima Manfaat 133 orang, meninggal dunia 37 orang	Akan di usulkan perubahan untuk menggantikan PM yang meninggal Dunia
5		Pemberian Layanan Kedaruratan	pengeluaran dana disesuaikan dengan kebutuhan	

PERMASALAHAN



NO	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Rehabilitas Sosial Keg: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pengeluaran BBM disesuaikan dengan Kebutuhan	
2		Penyediaan Permakanan	Keterlambatan Kelengkapan SPJ	Percepatan dalam melengkapi SPJ
3		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	Rapat persiapan HDI belum dilaksanakan	Percepatan Pelaksanaan rapat persiapan HDI pada bulan Juli

PERMASALAHAN



Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perjalanan dinas luar daerah belum terserap, dikarenakan pengeluaran sesuai dengan undangan dari Pusat /Propinsi	

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	P3A	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan sudah dilaksanakan, SPJ dalam proses karena terkait dengan organisasi di luar Dinas	Koordinasi dengan organisasi yang bersangkutan

PERMASALAHAN



Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keterlambatan juknis DAK, sudah dilakukan pergeseran anggaran dan menunggu penetapan DPPA pergeseran	Koordinasi dengan BPKPD

PERMASALAHAN



Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Bidang	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perjalanan Dinas menyesuaikan undangan dari Pusat/Propinsi	
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterlambatan Juknis DAK, sudah dilakukan pergeseran anggaran dan menunggu penetapan DPPA pergeseran	Koordinasi dengan BPKPD

PERMASALAHAN



Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	keterlambatan juknis DAK, sudah dilakukan pergeseran anggaran dan menunggu penetapan DPPA pergeseran	Koordinasi dengan BPKPD

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Perjalanan dinas luar daerah belum terserap, dikarenakan pengeluaran sesuai dengan undangan dari Pusat/Propinsi, adanya kegiatan yang belum dilaksanakan karena jadwal kegiatan yang Padat (Entry SIMEP)	Percepatan kegiatan di bulan Juli

PERMASALAHAN



Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah , Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perjalanan dinas menyesuaikan dengan undangan dari Pusat/ Propinsi, adanya kegiatan yang belum dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal dari kementrian PPPA Terkait penerimaan penghargaan KLA, SPJ dalam Proses	Pelaksanaan jadwal penghargaan KLA, rencana dilaksanakan bertepatan dengan hari anak nasional pada tanggal 23 Juli , percepatan SPJ

PERMASALAHAN



Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Keterlambatan juknis DAK, sudah dilakukan pergeseran anggaran dan menunggu penetapan DPPA pergeseran	Koordinasi dengan BPKPD

PERMASALAHAN



Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	P3A	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keterlambatan juknis DAK, sudah dilakukan pergeseran anggaran dan menunggu penetapan DPPA Pergeseran	Koordinasi dengan BPKPD

Pekerjaan di pihak ketigakan

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU DANA	NILAI KONTRAK	KONTRAK		TARGET	REALISASI		DEVIASI	
				MULAI	SELESAI		KEU.	FISIK	KEU.	FISIK
		(Rp)	(Rp)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Pengadaan Logistik Permakanan	111.000.000	106.380.000	07/03/22	11/11/22	100	100	100	0	0
2	Pengadaan Paket sandang	25.000.000	24.997.500	21/01/22	06/03/22	100	100	100	0	0
3	Pengadaan Jas Hujan dan Senter	30.030.000	29.947.500	21/01/22	06/03/22	100	100	100	0	0
4	Pengadaan Seragam Psikososial dan Kaos KWSB	16.842.000	16.830.000	21/01/22	21/03/22	100	100	100	0	0

LANJUTAN ...



NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU DANA	NILAI KONTRAK	KONTRAK		TARGET	REALISASI		DEVIASI		KET.
				MULAI	SELESAI		KEU.	FISIK	KEU.	FISIK	
		(Rp)	(Rp)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
5	Belanja Pakaian Bagi ODGJ di Rumah Singgah Dosaraso	39.584.000	39.545.800	24/01/22	22/02/22	100	100	100	0	0	
6	Penyediaan Alat Bantu	79.598.000	73.342.745	02/03/22	30/03/22	100	0	92	100	8	Proses Pencairan
7	Penyediaan Permakanan	166.416.000	165.510.000	31/01/22	27/12/22	100	38	57	62	43	Proses Pencairan Tahap 2

LANJUTAN ...



NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU DANA	NILAI KONTRAK	KONTRAK		TARGET	REALISASI		DEVIASI		KET.
				MULAI	SELESAI		KEU.	FISIK	KEU.	FISIK	
		(Rp)	(Rp)			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
8	Penyediaan Sandang	18.379.000	18.374.840	28/01/22	28/03/22	100	94	94	6	6	PM 6 Orang MD
9	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dan keluarga	723.360.000	631.314.000	07/03/22	02/09/22	100	0	66	100	34	Proses Pembayaran Tahap 1 Dan proses Distribusi tahap 2
10	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu WRSE	58.320.000	57.270.000	02/03/22	28/08/22	100	33	66	67	34	Proses Pencairan tahap 2